

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2020 berfluktuasi. Dimana SILPA pada periode 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar 3% yang disebabkan oleh penghematan belanja daerah pada tahun 2017. Sementara SILPA dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 22% dikarenakan tidak terjadinya pelampauan pendapatan daerah serta pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018, SILPA dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 32% yang disebabkan oleh penghematan belanja daerah pada tahun 2019. Sedangkan SILPA dari tahun 2019 ke 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 75%. Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut jika SILPA mengalami peningkatan maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT kurang efektif dalam mengelola kinerja keuangan. Sedangkan jika terjadi penurunan maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT cukup efektif dalam mengelola kinerja keuangan.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya SILPA pada APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan bahwa :
 - a. Pelampauan pendapatan daerah yang ditunjukan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi pendapatan daerah selalu lebih besar

jumlahnya daripada yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Pendapatan daerah yang paling potensial bersumber dari dana perimbangan khususnya dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

- b. Penghematan belanja daerah yang ditunjukkan dari data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi belanja daerah selalu lebih kecil daripada yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Penghematan belanja merupakan sumber terbesar penyebab SILPA di setiap tahun anggaran, yang bersumber dari belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2016-2020.
- c. Sisa dana kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang belum selesai bahkan belum sama sekali dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab timbulnya SILPA.

1.2 Saran

Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT perlu dilakukan perencanaan yang lebih cermat, seperti menetapkan target pendapatan daerah yang lebih tinggi berdasarkan potensi yang dapat dicapai, serta merencanakan belanja sebaik mungkin sehingga dapat terserap dengan baik. Pemerintah Provinsi NTT perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan dan mewujudkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat memberikan manfaat yang

seluas-luasnya secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*, Nusa Tenggara Timur.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*, Nusa Tenggara Timur.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*, Nusa Tenggara Timur.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Bali, Thomas Tuba. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya SILPA Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Hakim, A. R. 2016. *“Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)”*. Tesis. Universitas Gajah Mada
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
-2008. *Akuntansi Keuangan Daerah – edisi 3*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Iman Suharna. 2015. (Silpa) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2007-2013.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN.
Yogyakarta
-2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*.

Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta

Ramadhan, M. F. A., 2015. *“Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran Dan Temuan Audit Terhadap Silpa Pemerintah Daerah Di Indonesia”*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.